

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, hak organisasi diatur oleh undang-undang. Hak berorganisasi secara tidak langsung tersirat dalam Pancasila, sebagai sumber hukum Indonesia, dan tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 28 E (Ayat 3). Dalam pasal tersebut dikatakan “*bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.

Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksa atau melarang seseorang untuk bergabung dengan suatu organisasi. Tetapi, sekali lagi perlu diingat bahwa kebebasan ini tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Organisasi adalah segenap proses kegiatan menata dan membagi pekerjaan yang akan dilakukan, mengelompokkan orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar unit-unit dan individu sebagai pelaksana dari pekerjaan itu untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi tersebut.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan [visi](#) dan [misi](#) serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap [masyarakat](#). Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Kekompakan dalam organisasi itu sudah menjadi keharusan. Apabila dalam organisasi kekompakan itu tidak terjaga, maka hasil kerja tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin yang pandai membuat anggotanya kompak. Tidak jarang masalah muncul dalam organisasi. Di dalam kelompok belajar terkadang juga dijumpai masalah. Misalnya saja ada dalam satu kelompok yang anggota-anggotanya salah paham atau tidak

sependapat dengan anggota yang lain, maka peranan ketua kelompok ini sangat penting. Jangan sampai ketua kelompok membela salah satu anggota yang sedang bermasalah, tetapi sebaiknya ketua kelompok mampu menyatukan dan meredam pertikaian kelompok yang sedang bermasalah.

Dalam organisasi juga terkadang ada yang kurang rajin atau malas. Mungkin karena minder, mungkin karena tidak mengerti, dan lain-lain. Peranan pemimpin sangat besar untuk memotivasi anggotanya yang masih belum mempunyai semangat dalam bekerja sama. Bukan berarti ini hanya menjadi tanggung jawab pemimpin. Akan tetapi, pemimpin membuat suasana tumbuh untuk saling memberikan motivasi sesama anggota yang lain dengan melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan merupakan salah indikator berkembangnya bangsa kearah yang lebih baik. Dalam merealisasikan pendidikan perlu adanya program pembelajaran yang menjalankan pembinaan nilai dan moral. Pembelajaran sikap ini di Indonesia secara formal diusung melalui program pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus pengertian pendidikan kewarganegaraan dapat dicermati pada penjelasan pasal 37 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikemukakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa”.

Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang baik selalu menimbulkan kerumitan, karena: *pertama*, pendidikan kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik. *Kedua*, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan, atribut "baik" dari seorang warga negara juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraan. *Ketiga*, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (urusan publik) tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif, yakni tidak hanya menjadi “warga negara yang baik” (*good citizen*) tetapi juga menjadi "warga negara yang aktif" (*active citizen*).

Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) serta nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) serta nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*), serta memahami dan menguasai nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian. (<http://soddis.blogspot.co.id/2015/03/pendidikankewarganegaraan-dan.html>)

Adapun Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas. Itu adalah yang harus di kembangkan dalam Organisasi di Masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, di Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, bahwa pemahaman masyarakat tentang pengertian organisasi sudah cukup baik, namun sikap yang mencerminkan berorganisasi masyarakat sangat memprihatinkan. Tidak mau bermusyawarah, mau menang sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri, tidak mau melaksanakan hasil dari musyawarah, kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah, kurangnya rasa solidaritas diantara warga di kampung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bersikap emosional serta perilaku tidak menghargai orang lain. Kurangnya sikap sosial, lemahnya nilai-nilai demokrasi, serta perilaku berorganisasi yang tidak mencerminkan sikap demokratis di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul **“Pengembangan Nilai-Nilai Kewarganegaraan dalam Kegiatan Organisasi Masyarakat Untuk Membentuk Warga Negara yang Baik (Studi**

## **Deskriptif Analitis di Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka)”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul antara lain:

1. Organisasi sudah cukup baik, namun sikap yang mencerminkan berorganisasi masyarakat sangat memprihatinkan. Tidak mau bermusyawarah, mau menang sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri, tidak mau melaksanakan hasil dari musyawarah,
2. Kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah, kurangnya rasa solidaritas diantara warga di kampung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bersikap emosional serta perilaku tidak menghargai orang lain. Kurangnya sikap sosial, lemahnya nilai-nilai demokrasi, serta perilaku berorganisasi yang tidak mencerminkan sikap demokratis di masyarakat

### **C. Rumusan dan Batasan Masalah**

#### **1. Rumusan Masalah**

Secara umum masalah-masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : **“Bagaimanakah Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam Kegiatan Berorganisasi di Masyarakat untuk Membentuk Warga Negara yang Baik”**

#### **2. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah langkah langkah penelitian selanjutnya, maka masalah pokok yang sudah di rumuskan tadi aka peneliti uraikan lagi menjadi sub-sub rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a) Bagaimana bentuk kegiatan organisasi di masyarakat untuk membentuk warga negara yang baik Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka ?

- b) Bagaimana pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan yang dapat di kembangkan di dalam masyarakat Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka?
- c) Bagaimana kendala-kendala masyarakat yang dihadapi dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka?
- d) Bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai ”Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam Kegiatan Berorganisasi di Masyarakat untuk membentuk warga negara yang baik”

##### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang :

- a) Bentuk kegiatan organisasi di masyarakat untuk membentuk warga negara yang baik.
- b) Pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan yang dapat di kembangkan di dalam masyarakat.
- c) Kendala-kendala masyarakat yang dihadapi dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan.
- d) Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan tentang Nilai-nilai Kewarganegaraan yang dapat dikembangkan khususnya dalam kegiatan berorganisasi di masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebuah teori tidak akan banyak bermakna apabila tidak diikuti oleh aplikasinya di lapangan, secara praktis penelitian ini di harapkan:

- a) **Bagi Masyarakat**, khususnya pelaku aktif organisasi di masyarakat diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan

motivasi mengenai urgensi pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam kegiatan berorganisasi di masyarakat untuk membentuk warga negara yang baik, terlebih bagi masyarakat lain pada umumnya.

- b) **Bagi Peneliti**, diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam mengetahui dan memahami bagaimana pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan dikaitkan dengan kegiatan berorganisasi di masyarakat.

## F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul penelitian, maka penulisan memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Nilai (*value=valere*) adalah kualifikasi arga atau isi pesan yang di bawakan atau tersurat atau tersirat dalam norma dan melekat pada seluruh instrumental input manusia. A Kosasih Djahiri (2006, h. 6)
2. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang harus di perluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari masyarakat yang kesemuanya itu di proses guna melatih para masyarakat untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Numan Somantri (2001, h. 299)
3. Nilai-nilai Kewarganegaraan dengan merujuk kepada tujuan pendidikan nasional yang sangat sarat akan nilai, dapat di uraikan sebagai berikut : beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa sebagai nilai keberagaman, berakhlak mulia sebagai nilai bentuk sosial-kultural keberagaman, sehat sebagai bentuk nilai fisik dan rohaniah, berilmu sebagai bentuk nilai kecerdasan substantif, cakap sebagai bentuk nilai kecerdasan operasional, kreatif sebagai bentuk nilai inovatif, mandiri sebagai bentuk nilai personal sosial, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagai nilai personal politik. Udin S Winataputra dan Dasim Budimansyah (2007, h. 178)
4. Visi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kedepan adalah menjadi program pendidikan sekolah yang integrasi dalam rangka melahirkan warga negara

yang berkecerdasan ganda, demokratis, berbudi pekerti luhur, bermoral tinggi dan mandiri, bertanggung jawab, terampil dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia baik tingkat lokal, nasional dan global dengan tetap berlandaskan kepada nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan dalam Pancasila dan UUD 1945 (Cogan, et al., 1997; Somantri, 2001). Sebagaimana dikutip oleh I Wayan Sukadi (2006, h. 172)

5. Pengajaran nilai/moral dalam PKn menghendaki lahirnya generasi muda yang memiliki sejumlah bekal sistem nilai baku yang positif sebagai landasan dan barometer kehidupan, dan lebih jauh lagi sebagai generasi pelurus dan pembaharu nilai/moral menuju nilai dan moral yang diinginkan; yaitu nilai dan moral Pancasila. A Kosasih Djahiri (1985, h. 21)
6. Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Stephen Robbins yang dikutip oleh Achmad Sobirin (2007, h. 5)
7. Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat ; Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## **G. Sistematika Skripsi**

### **1. Bagian Pembuka Skripsi**

Di bagian pembuka disusun urutan; 1) halaman sampul, 2) halaman pengesahan, 3) halaman motto dan persembahan, 4) halaman pernyataan keaslian skripsi, 5) kata pengantar, 6) ucapan terimakasih, 7) abstrak, 8) daftar isi, 9) daftar tabel, 10) daftar gambar, 11) daftar lampiran

### **2. Bagian Isi Skripsi**

Pada bagian ini skripsi terdapat 5 bagian bab yang disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dengan urutan : a. Latar belakang masalah, b. Identifikasi masalah, c. Rumusan masalah, d. Batasan masalah, e. Tujuan penelitian, f. Manfaat penelitian, g. Kerangka pemikiran, h. Definisi operasional, dan i. Sistematika skripsi.

Bab II kajian teoritis dengan urutan : a. Kajian teori dan kaitanya dengan pembelajaran yang akan diteliti, b. Kerangka pemikiran dan, c. Asumsi dan hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian.

Bab III dengan urutan a. Metode penelitian, b. Desain penelitian, c. Subjek dan objek penelitian, d. Pengumpulan data dan instrumen penelitian e. Teknik analisis data, dan f. Prosedur penelitian

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan dengan urutan : a. Deskripsi hasil dan temuan penelitian dan b. Pembahasan penelitian

Bab V kesimpulan dan saran dengan urutan : a. Kesimpulan, dan b.

Saran

### **3. Bagian Akhir Skripsi**

Pada bagian akhir skripsi disusun dengan urutan : a. Daftar pustaka b. Lampiran-lampiran dan c. Daftar riwayat hidup.